



**PERUBAHAN RENJA
(RENCANA KERJA)
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. .

Rencana Kerja adalah merupakan suatu perencanaan dari sebuah program dan kegiatan kerja yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa pada Tahun 2024 tetap berkenaan pada soal Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan-Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan dengan ukuran tingkat kinerja Sumber Daya Manusia dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini selain untuk dapat memberi arahan bagi penyelenggara kegiatan juga dapat diharapkan dapat memberi informasi atau gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misinya.

Kami ucapkan terimah kasih kepada Tim penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dan semua pihak yang sudah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan dokumen ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Landasan Hukum	5
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	12
II.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD	23
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	25
II.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	34
III.3 Program dan Kegiatan	35
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT KERJA	43
BAB V PENUTUP	47
DAFTAR TABEL	
Tabel : Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
Tabel : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gowa	
Tabel : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Gowa	
Tabel : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	

B A B I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan indikator kinerja utama pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 pun dilakukan perubahan agar semua dokumen perencanaan menjadi selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

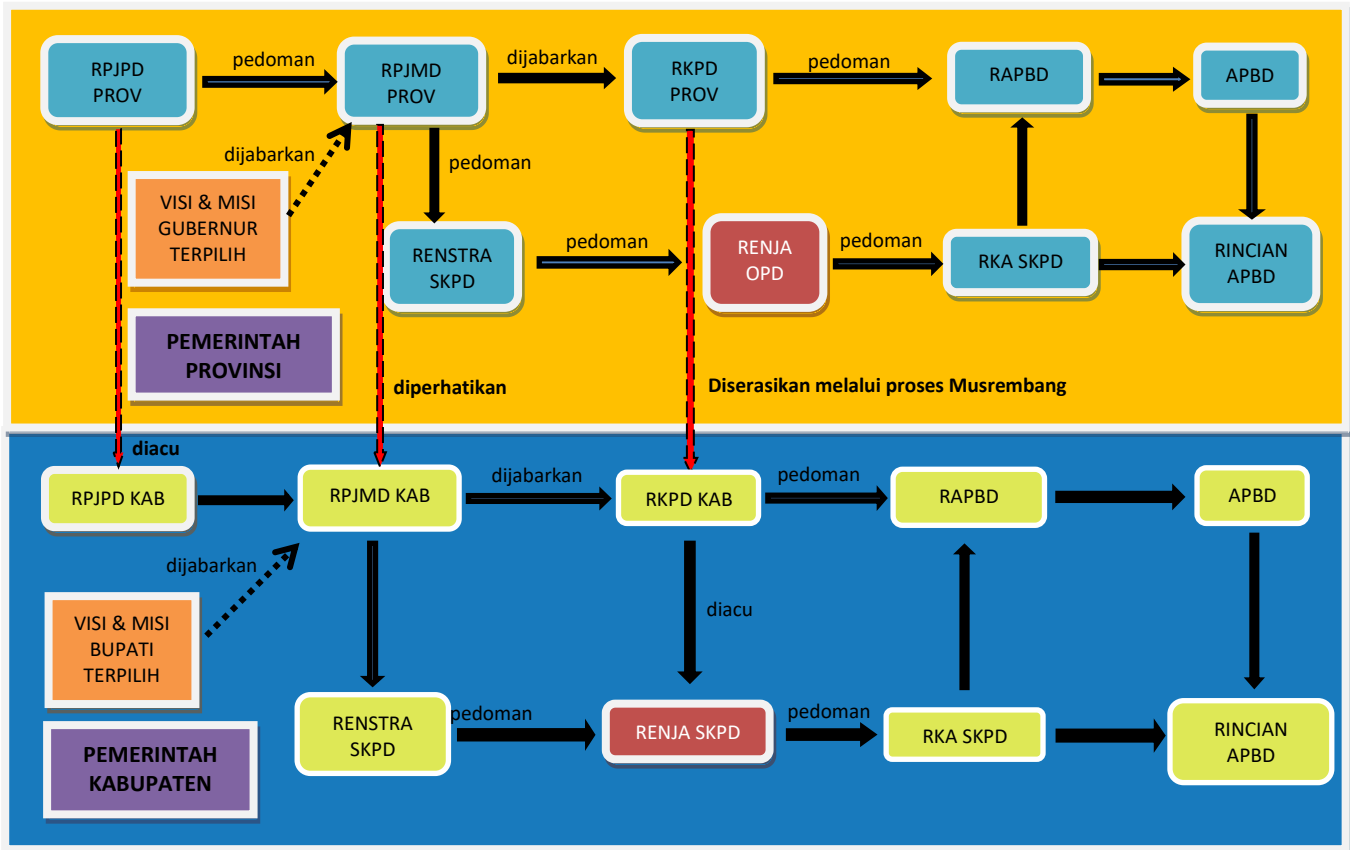
Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Prinsip – prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Seperti yang terlihat dibawah ini :

Bagan I.1
Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ;
11. Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1. Melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD;
3. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan;
4. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
5. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam pencapaian program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat arah kebijakan pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
6. Mewujudkan komitmen bersama dalam tahapan pencapaian Visi, Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Periode 2021-2026.
7. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada umumnya

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk

tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam perumusan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa setiap tahunnya dengan menerima masukan dari berbagai pihak baik pemangku kepentingan maupun *stake holder*.

2. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Merupakan komitmen bersama masing – masing, Sekretaris dan Bidang terhadap pelaksanaan program – program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu :
 - Masukan
 - Keluaran
 - Hasil

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- III.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Pokok Tahun 2022 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 , serta Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2022, No.02 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 291.121.638.169,98 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 262.749.583.337,00 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	BELANJA	291.121.638.169,98	262.749.583.337,00	90,25
A	BELANJA OPERASI	65.680.579.783,98	38.404.562.250,00	68,95
	Belanja Pegawai	51.818.429.988,00	29.723.691.696,00	57,36
	Belanja Barang dan Jasa	3.878.390.295,00	3.376.848.395,00	87,07
	Belanja Bunga	9.983.759.500,00	5.304.022.159,00	53,13
B	BELANJA MODAL	287.485.300,00	283.855.700,00	98,74
	Belanja Peralatan dan Mesin	287.485.300,00	283.855.700,00	98,74
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.261.495.385,00	1.949.892.460,00	86,22
	Belanja Tidak Terduga	2.261.495.385,00	1.949.892.460,00	86,22
D	BELANJA TRANSFER	222.892.077.701,00	222.111.272.927,00	99,64
	Belanja Bagi Hasil	1.675.443.701,00	1.068.106.323,00	63,75
	Belanja Bantuan Keuangan	221.216.634.000,00	221.043.166.604,00	99,92

Dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.939.517.810,98 dan terealisasi sebesar Rp.31.724.383.123,00 atau 58,81 % terdiri dari 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.317.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.379.000,00 atau 74,82% terdiri dari 2 (dua) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.939.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.013.000,00 atau 69,50%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.378.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.366.000,00 atau 99,88%.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.52.113.643.389,98,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.995.896.496,00 atau 57,56% terdiri dari 3 (tiga) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.638.569.988,98 dan terealisasi sebesar Rp.29.560.431.696,00 atau 57,24%.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.460.128.401,00 dan terealisasi sebesar Rp.420.701.800,00 atau 91,43%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.945.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.763.000,00 atau 98,78%

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.150.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.250.000,00 atau 89,38% terdiri dari 1 (satu) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.126.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.950.000,00 atau 98,77%.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.23.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.300.000,00 atau 39,24%.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 991.953.361,00 dan terealisasi sebesar Rp.940.616.875,00 atau 94,82% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.253.551.159,00 dan terealisasi sebesar Rp.253.165.000,00 atau 99,85 %.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.700.000,00 atau 95,00 %
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.445.000,00 atau 85,39 %
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.636.158.002,00 dan terealisasi sebesar Rp.597.624.875,00 atau 93,94 %

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.287.485.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.855.700,00 atau 98,74 % terdiri dari 1 (satu) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.287.485.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.855.700,00 atau 98,74 %

VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.85.183.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.78.583.010,00 atau 92,25% terdiri dari 2 (dua) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.758.010,00 atau 78,81 %.
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.533,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.825.000,00 atau 94,82 %.

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 251.735.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.246.802.042,00 atau 98.04 % terdiri dari 2 (dua) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.139.296.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.418.048,00 atau 96,50 %.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.112.438.860,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.383.994,00 atau 99,95 %.

Dari Program dan Kegiatan tersebut Indikator Kinerja yang dicapai adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Dokumen SAKIP, Laporan Keuangan Akhir Tahun dan terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran, Pakaian Dinas, Peralatan Kantor serta terpeliharanya Kendaraan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.563.901.373,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.306.514.703,00 atau 38,56 % terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut:

- I. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.736.784.693,00 dan terealisasi sebesar Rp.588.592.090,00 atau 79,89% terdiri dari 7 (tujuh) sub.kegiatan, sebagai berikut:
 1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.16.891.750,00 dan tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.
 2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.116.750,00 dan tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.114.000,00 atau 68,07 %.
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.714.568,00 atau 98,09 %.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.453.298.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.420.944.892,00 atau 92,86 %.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.152.187.693,00 dan terealisasi sebesar Rp.86.818.630,00 atau 57.05 %.
- II. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.499.522.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.460.356.422,00 atau 92,16% terdiri dari 5 (lima) sub.kegiatan, sebagai berikut:
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.41.242.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.832.000,00 atau 99,01 %.
 2. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.115.259.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.110.250.952,00 atau 95,65%.

3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.60.029.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.442.750,00 atau 92,36%.
4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas S{2D dengan Instansi Terkait dengan jumlah anggaran sebesar Rp.134.601.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.324.520,00 atau 99,79%.
5. Pembinaan, Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.148.389.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.506.200,00 atau 80,54%.

III. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.327.594.480,00 dan terealisasi sebesar Rp.257.566.191,00 atau 78,62% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.99.240.380,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.690.000,00 atau 52,09%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.144.594.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.438.191,00 atau 99,89%.
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.249.750,00 dan tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.62.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.438.000,00 atau 98,29%.

IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 235.137.332.586,00 dan terealisasi sebesar Rp.229.365.187.546,00 atau 97,55% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.983.759.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.304.022.159,00 atau 53,13% pada Tahun Anggaran 2022.
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 221.216.634.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 221.043.166.604,00 atau 99,92%.
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.261.495.385,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.949.892.460,00 atau 86,22%.
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.675.443.701,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.068.106.323,00 atau 63,75%.

Dari Program dan Kegiatan tersebut Indikator Kinerja yang dicapai adalah tersedianya APBD Kabupaten Gowa, Penatausahaan Keuangan, Terlayannya Pihak Ketiga, Perda Pertanggungjawaban APBD, Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pelaksaaan Kegiatan yang Mendesak serta Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

C. Program Pengelolaan barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.473.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.432.588.600,00 atau 91,29% terdiri dari 1 (satu) kegiatan, sebagai berikut:

- I. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 480.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.353.497.965,00 atau 73.51% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.107.217.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.444.517,00 atau 98,35%.
2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.124.127.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.581.256,00 atau 52.83%.
3. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.378.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.235.900,00 atau 57,63%.
4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.216.162.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.163.236.292,00 atau 75,52%.

Berdasarkan hasil review terhadap pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 dan pencapaian kinerja RENSTRA, maka rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dan pencapaian RENSTRA sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
REVIEW EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan														
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
4	04	02	01	01	Program Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	04	02	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	7 Dokumen	19	271%
4	04	02	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10	250%
4	5	6	7	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9	300%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
4	04	02	01	09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	100%	55 Orang/Bulan	165	300%
4	04	02	01	12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 Dokumen	156 Dokumen	156 Dokumen	156 Dokumen	100%	156 Dokumen	468	300%
4	5	6	7	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	300%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
4	04	02	01	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9	300%
4	04	02	01	18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	4 Orang	14	350%
4	5	6	7	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	30	300%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6	300%
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15	300%
4	04	02	02	02	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	100%	100%
4	04	02	02	07	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0%	12 Laporan	36	300%
4	04	02	02	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
4	04	02	02	09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
4	04	02	02	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6	300%

4	04	02	02	24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
4	04	02	03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	8%
4	04	02	03	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
4	5	6	7	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	90	300%
4	04	02	05		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	100%	10%
4	04	02	05	01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	04	02	06		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran Pemerintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	04	02	06	01	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	54 Dokumen	162	300%
4	04	02	06	04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	54 Dokumen	162	300%
4	04	02	06	05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	54 Dokumen	162	300%
4	04	01	15		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	54 Dokumen	100%	2%
4	04	01	15	01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12	300%
4	04	01	15	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12	300%
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
4	5	6	7	8	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemolongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7500 Dokumen	7500 Dokumen	7500 Dokumen	7500 Dokumen	100%	7500 Dokumen	22,500	300%
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	786 Dokumen	786 Dokumen	786 Dokumen	786 Dokumen	100%	786 Dokumen	2,358	300%
					Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2400 Dokumen	100%	2400 Dokumen	7,200	300%
4	04	01	15	06	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5100 Dokumen	5100 Dokumen	5100 Dokumen	5100 Dokumen	100%	5100 Dokumen	15,300	300%
4	5	6	7	8	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	240	300%

					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	649 Dokumen	649 Dokumen	649 Dokumen	649 Dokumen	100%	649 Dokumen	1,947	300%
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Kabupaten /Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Temuan	2 Temuan	2 Temuan	2 Temuan	100%	2 Temuan	6	300%
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	240	300%
4	5	6	7	8	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	121 Laporan	121 Laporan	121 Laporan	121 Laporan	100%	121 Laporan	363	300%
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	121 Laporan	121 Laporan	121 Laporan	121 Laporan	100%	121 Laporan	363	300%
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
4	5	6	7	8	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten /Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	167 Laporan	167 Laporan	167 Laporan	167 Laporan	100%	167 Laporan	501	300%
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12	300%
4	04	01	15	11	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	30 Dokumen	60	200%
4	5	6	7	8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12	300%
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	300%

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016–2021. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi juga digambarkan dalam dokumen ini. Berikut formulasi pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Formulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK

Selanjutnya Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100
Rata-rata Capaian					100 %

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah semuanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama di atas sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu tepat waktu dengan capaian (100 %).

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kedepannya yakni:

1. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;
2. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis Kinerja;
3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Asli Daerah.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Menerbitkan regulasi untuk kegiatan tertentu dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan yang akan datang.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD serta melakukan pengalokasian pembelanjaan dengan menggunakan skala prioritas sesuai tingkat kebutuhan yang berbasis kinerja;
3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM yang dapat menguasai teknologi sistem informasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPKD TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	100%	43,755,150,432.00	Program Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	100%	43,755,150,432.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	66,830,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	66,830,000.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	48,939,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	48,939,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	17,891,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	17,891,000.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	42,502,772,961.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	42,502,772,961.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	42,081,443,961.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	42,081,443,961.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen	387,747.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen	387,747.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33,582,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33,582,000.00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	158,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	158,000,000.00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	138,000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	138,000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20,000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20,000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	736,146,683.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	736,146,683.00	
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9,345,683	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9,345,683	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	220,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	220,000,000.00	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7,200,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7,200,000.00	
4	Penyediaan Bahan / Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	71,700,000	Penyediaan Bahan / Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	71,700,000	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	82,500,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	82,500,000.00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	345,401,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	345,401,000.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	45,592,095.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	45,592,095.00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	45,592,095.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	45,592,095.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86,620,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86,620,000.00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,980,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,980,000.00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66,640,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66,640,000.00	

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	159,188,693.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	159,188,693.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	118,325,500.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	118,325,500.00
2	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	40,863,193.00	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	40,863,193.00
II Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	244,781,169,041.00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	244,781,169,041.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase dokumen penganggaran Pemerintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	543,955,669.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase dokumen penganggaran Pemerintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	543,955,669.00
1	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	BPKD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,453,320.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	BPKD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,453,320.00
2	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,453,320.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,453,320.00
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	48,734,680.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	48,734,680.00
4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	49,223,209.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	49,223,209.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	226,510,570.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	226,510,570.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	184,580,570.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	184,580,570.00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	304,920,500.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	304,920,500.00
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	41,242,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	41,242,000.00
2	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	95,260,000.00	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	95,260,000.00
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	60,030,000.00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	60,030,000.00
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5100 Dokumen	84,601,000.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5100 Dokumen	84,601,000.00
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	80 Orang	23,787,500.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	80 Orang	23,787,500.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	100%	332,292,872.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	332,292,872.00
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Dokumen	103,378,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Dokumen	103,378,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	1 Dokumen	151,765,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	1 Dokumen	151,765,000
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Temuan	14,150,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Temuan	14,150,000
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	62,999,872	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	62,999,872
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	243,600,000,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	243,600,000,000
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	16,000,000,000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	16,000,000,000
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	221,000,000,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	221,000,000,000
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5,000,000,000
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	167 Laporan	1,600,000,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	167 Laporan	1,600,000,000

III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	450,923,250	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	450,923,250	
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	100%	450,923,250.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	100%	450,923,250.00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	113,878,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	4 Dokumen	113,878,000.00	
2	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	96,120,750.00	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	96,120,750.00	
3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	34,769,000.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	34,769,000.00	
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	206,155,500.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	206,155,500.00	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan SKPD penunjang urusan dibidang keuangan sehingga menyusun program dan kegiatan sifatnya hanyalah rutin karena tidak bersentuhan langsung ke Masyarakat sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun stakeholder. Adapun tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

Tabel.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gowa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada	-	-	-	-

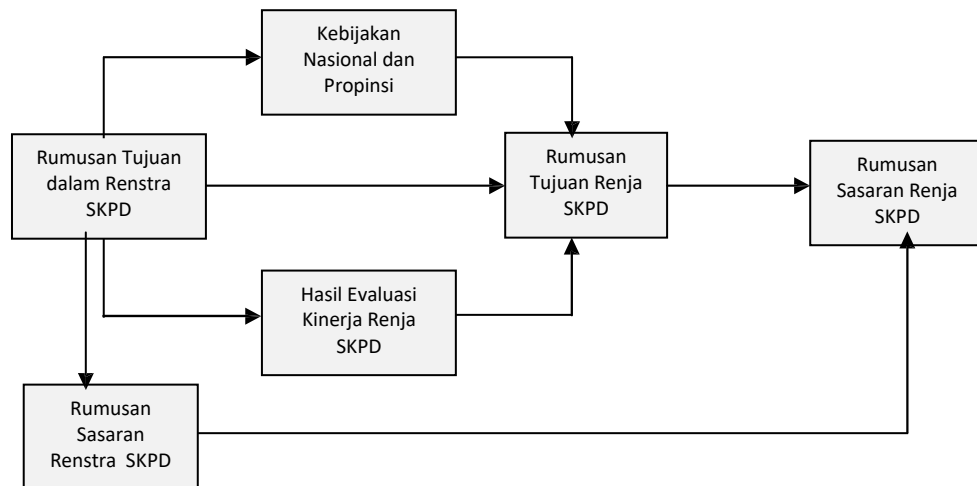
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

Bagan III.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN



III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih priode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah “***Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik***”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 – 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

2. ***Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.***

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. ***Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.***

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. ***Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.***

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu, ***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.***

Dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di periode tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

III.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung pencapaian misi kepala Daerah adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” ”.

III.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

III.3. Program dan Kegiatan

- **Program**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dan SKPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkup Kabupaten Gowa dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Periode 2021-2026 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi

anggaran untuk program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan . Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang dimaksud antara lain:

a. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggarn, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ◆ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ◆ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ◆ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- ◆ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ◆ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ◆ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ◆ Penyediaan Bahan/Material
- ◆ Fasilitas Kunjungan Tamu

- ◆ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ◆ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- 1). Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - ◆ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
 - ◆ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD

- 2). Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - ◆ Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - ◆ Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - ◆ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - ◆ Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - ◆ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - ◆ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - ◆ Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4). Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - ◆ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - ◆ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - ◆ Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

- ◆ Sub Kegiatan :
- ◆ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- ◆ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ◆ Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ◆ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 sesuai dengan Rancangan awal RKPD , dapat dilihat pada table berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

DAH PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Rancangan Awal RKP			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	BPKD	100%	43,755,150,432.00	PAD	Rancangan awal RKP	100%	43,755,150,432.00
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	BPKD	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	BPKD	100%	66,830,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	100%	66,830,000.00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	4 dokumen	48,939,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	4 dokumen	48,939,000.00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	3 dokumen	17,891,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	3 dokumen	17,891,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	BPKD	100%	42,502,772,961.00	PAD	Rancangan awal RKP	100%	42,502,772,961.00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	55 Orang/Bulan	42,081,443,961.00	PAD	Rancangan awal RKP	55 Orang/Bulan	42,081,443,961.00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	156 Dokumen	387,747,000	PAD	Rancangan awal RKP	156 Dokumen	387,747,000
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	1 Laporan	33,582,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	1 Laporan	33,582,000.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	BPKD	100%	158,000,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	100%	158,000,000.00
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	3 paket	138,000,000	PAD	Rancangan awal RKP	3 paket	138,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKD	5 Orang	20,000,000	PAD	Rancangan awal RKP	5 Orang	20,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	100%	736,146,683.00	PAD	Rancangan awal RKP	100%	736,146,683.00
-	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKD	10 Paket	9,345,683	PAD	Rancangan awal RKP	10 Paket	9,345,683
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKD	2 Paket	220,000,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	2 Paket	220,000,000.00
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPKD	5 Dokumen	7,200,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	5 Dokumen	7,200,000.00
-	Penyediaan Bahan/Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKD	2 Paket	71,700,000	PAD	Rancangan awal RKP	2 Paket	71,700,000
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD	12 Laporan	82,500,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	12 Laporan	82,500,000.00
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	12 Laporan	345,401,000.00	PAD	Rancangan awal RKP	12 Laporan	345,401,000.00

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	BPKD	100%	45,592,095.00		Rancangan awal RKPD	100%	45,592,095.00
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKD	2 unit	45,592,095.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2 unit	45,592,095.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	100%	86,620,000.00		Rancangan awal RKPD	100%	86,620,000.00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKD	12 Laporan	19,980,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	12 Laporan	19,980,000.00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKD	12 Laporan	66,640,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	12 Laporan	66,640,000.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	BPKD	100%	159,188,693.00		Rancangan awal RKPD	100%	159,188,693.00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKD	30 unit	118,325,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD	30 unit	118,325,500.00
-	Pemelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKD	13 unit	40,863,193.00	PAD	Rancangan awal RKPD	13 unit	40,863,193.00
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	100%	1,258,919,041.00		Rancangan awal RKPD	100%	1,258,919,041.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase dokumen penganggaran Peemrintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	BPKD	100%	621,705,669.00		Rancangan awal RKPD	100%	621,705,669.00
1	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	17,453,320.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 Dokumen	17,453,320.00
2	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	17,453,320.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 Dokumen	17,453,320.00
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	48,734,680.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 Dokumen	48,734,680.00
4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	49,223,209.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 Dokumen	49,223,209.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	BPKD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKD	4 Dokumen	226,510,570.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4 Dokumen	226,510,570.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		4 Dokumen	184,580,570.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4 Dokumen	184,580,570.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKD	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKD	100%	77,750,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	100%	77,750,000.00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKD	7500 Dokumen	304,920,500.00		Rancangan awal RKPD	7500 Dokumen	304,920,500.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	810 Dokumen	41,242,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	810 Dokumen	41,242,000.00
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	2400 Dokumen	95,260,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2400 Dokumen	95,260,000.00
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	5100 Dokumen	60,030,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	5100 Dokumen	60,030,000.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	80 Orang	84,601,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	80 Orang	84,601,000.00
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	100%	23,787,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD	100%	23,787,500.00

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	BPKD	649 Dokumen	332,292,872.00		Rancangan awal RKPD	649 Dokumen	332,292,872.00
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	1 Dokumen	103,378,000		Rancangan awal RKPD	1 Dokumen	103,378,000
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Kabupaten /Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	BPKD	2 Temuan	151,765,000		Rancangan awal RKPD	2 Temuan	151,765,000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	80 Orang	14,150,000		Rancangan awal RKPD	80 Orang	14,150,000
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	100%	62,999,872		Rancangan awal RKPD	100%	62,999,872
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan	BPKD	100%	243,600,000,000		Rancangan awal RKPD	100%	243,600,000,000
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan hasil analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	BPKD	121 Laporan	16,000,000,000		Rancangan awal RKPD	121 Laporan	16,000,000,000
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	12 Laporan	221,000,000,000		Rancangan awal RKPD	12 Laporan	221,000,000,000
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	12 Laporan	5,000,000,000		Rancangan awal RKPD	12 Laporan	5,000,000,000
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD	167 Laporan	1,600,000,000		Rancangan awal RKPD	167 Laporan	1,600,000,000
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan	BPKD	100%	450,923,250.00		Rancangan awal RKPD	100%	450,923,250.00
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	BPKD	100%	450,923,250.00		Rancangan awal RKPD	100%	450,923,250.00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	4 Dokumen	113,878,000.00		Rancangan awal RKPD	4 Dokumen	113,878,000.00
-	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	30 Dokumen	96,120,750.00		Rancangan awal RKPD	30 Dokumen	96,120,750.00
-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	4 Laporan	34,769,000.00		Rancangan awal RKPD	4 Laporan	34,769,000.00
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	BPKD	1 Laporan	206,155,500.00		Rancangan awal RKPD	1 Laporan	206,155,500.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan sebagaimana. Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Rancangan Awal RKPD			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	BPKD	100%	43,755,150,432.00	PAD	Rancangan awal RKPD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	BPKD	100%	66,830,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	4 dokumen	48,939,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	3 dokumen	17,891,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	BPKD	100%	42,502,772,961.00		Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	55 Orang/Bulan	42,081,443,961.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	156 Dokumen	387,747,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	1 Laporan	33,582,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	BPKD	100%	158,000,000.00		Rancangan awal RKPD
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKD	3 paket	138,000,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKD	5 Orang	20,000,000	PAD	Rancangan awal RKPD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD	100%	736,146,683.00		Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKD	10 Paket	9,345,683	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKD	2 Paket	220,000,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPKD	5 Dokumen	7,200,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Bahan/Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKD	2 Paket	71,700,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	12 Laporan	82,500,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	12 Laporan	345,401,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	BPKD	100%	45,592,095.00		Rancangan awal RKPD
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKD	2 unit	45,592,095.00	PAD	Rancangan awal RKPD

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	100%	86,620,000.00		Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKD	12 Laporan	19,980,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKD	12 Laporan	66,640,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	BPKD	100%	159,188,693.00		Rancangan awal RKPD
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKD	30 unit	118,325,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Pemelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKD	10 unit	40,863,193.00	PAD	Rancangan awal RKPD
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	100%	1,258,919,041.00		Rancangan awal RKPD
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase dokumen penganggaran Penerimaan daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	BPKD	100%	621,705,669.00		Rancangan awal RKPD
1	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	BPKD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	17,453,320.00	PAD	Rancangan awal RKPD
2	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	17,453,320.00	PAD	Rancangan awal RKPD
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	48,734,680.00	PAD	Rancangan awal RKPD
4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54 Dokumen	49,223,209.00	PAD	Rancangan awal RKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	BPKD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKD	4 Dokumen	226,510,570.00	PAD	Rancangan awal RKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKD	4 Dokumen	184,580,570.00	PAD	Rancangan awal RKPD
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKD	100%	304,920,500.00	100%	Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	8000 Dokumen	41,242,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	810 Dokumen	95,260,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	2600 Dokumen	60,030,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	5400 Dokumen	84,601,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadil dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	80 Orang	23,787,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	BPKD	100%	332,292,872.00		Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	649 Dokumen	103,378,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Kabupaten /Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	BPKD	1 Dokumen	151,765,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	2 Temuan	14,150,000	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	80 Orang	62,999,872	PAD	Rancangan awal RKPD
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan	BPKD	100%	243,600,000,000		Rancangan awal RKPD
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	121 Laporan	16,000,000,000	DAU	Rancangan awal RKPD
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	121 Laporan	221,000,000,000	DAU	Rancangan awal RKPD
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	12 Laporan	5,000,000,000	DAU	Rancangan awal RKPD
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD	167 Laporan	1,600,000,000	PAD	Rancangan awal RKPD
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan	BPKD	100%	450,923,250.00	PAD	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	BPKD	100%	450,923,250.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	4 Dokumen	113,878,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	30 Dokumen	96,120,750.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	4 Laporan	34,769,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	BPKD	1 Laporan	206,155,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa tahun 2024. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

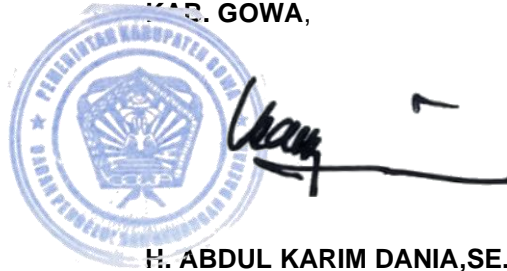
Renja SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 6 Juni 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KAB. GOWA,**



H. ABDUL KARIM DANIA,SE.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199603 1 012